

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Istilah "politik" secara gamblang mengacu pada upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengelola hubungan internal dan eksternal negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu (*i.e.* kepentingan nasional). Politik dalam praktiknya selalu melibatkan aspek keamanan untuk menjamin tercapainya kepentingan nasional dan terjaga dari ancaman internal atau ancaman eksternal. Melalui lingkungan internasional, negara menyampaikan kebijakan, membangun koneksi, dan mencari solusi kooperatif untuk masalah yang berkaitan dengan keamanan internasional sebagai upaya pencapaian kepentingan nasional negara (Marinov, 2024, pp. 168-169).

Perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan terjadinya pergeseran isu dalam hubungan internasional. Pengembangan dan adopsi teknologi nirkabel generasi kelima (5G) telah berkembang menjadi arena persaingan geopolitik yang signifikan. Teknologi 5G meningkatkan performa pemrosesan datanya dengan menggabungkan komponen teknologi yang baru dan lebih baik dengan komponen dari "generasi" teknologi seluler sebelumnya (Healy, 2023, p. 2). Meskipun masih belum jelas implikasinya, 5G diharapkan memiliki dampak besar pada masyarakat, pemerintah, regulasi, cara hidup kita, dan bahkan tatanan dunia. Mengingat potensinya yang sangat besar untuk memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan mendorong era inovasi, industri, dan ekonomi berikutnya, 5G telah diakui sebagai industri strategis utama di masa depan bersama dengan *Internet of Things* (IoT) (MP et al., 2019, pp. 10-11).

Sebagai upaya untuk membantu peluncuran 5G, Inggris telah memulai sejumlah program, rencana, tempat pengujian, dan uji coba yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dengan perusahaan telekomunikasi. Upaya pengadaan 5G tersebut, Inggris tuangkan melalui sebuah rencana strategis bernama *Digital Strategy 2017* (DDCMS & DSIT, 2017, p. 7). Anggaran sebesar £1 miliar dibuat dalam strategi untuk mendukung peluncuran 5G di seluruh Inggris untuk

berbagai penggunaan, termasuk pertanian pintar menggunakan drone, perawatan kesehatan di rumah, produktivitas pabrik, dan mobil tanpa pengemudi (MP et al., 2019, p. 11).

Huawei menjadi salah satu perusahaan multi-nasional yang diberikan izin oleh Pemerintah Inggris untuk dilibatkan pada pengembangan infrastruktur jaringan 5G di Inggris (Friis & Lysne, 2021, p. 1188). Sebagai raksasa perusahaan jaringan asal Tiongkok, Huawei memiliki jejak global yang luas dengan area operasi di 170 negara (Liu, 2021, p. 1). Sepak terjang Huawei di Inggris dapat ditelusuri kembali pada tahun 2001, ketika pertama kali Huawei menginjakkan kakinya di kontinental Eropa dengan membuka kantor pusat Eropa-nya di Basingstoke, Inggris (Liu, 2021, p. 3). Kedudukan Huawei di Inggris baru terkokohkan pada tahun 2005, ketika Huawei menjalin kerjasama dengan British Telecom (BT) dan Vodafone—dua perusahaan penyedia layanan telekomunikasi asal Inggris—untuk menjadi penyalur perlengkapan telekomunikasi kedua perusahaan tersebut melalui sebuah kerangka kerjasama yang disebut “*Global Framework Agreement*” (Huawei, 2005).

Seiring berjalannya waktu, permintaan untuk perangkat telekomunikasi Huawei semakin meningkat sehingga untuk meminimalisir risiko keamanan terkait dengan keterlibatan Huawei dalam jaringan Inggris, Huawei Cyber Security Evaluation Center (HCSEC) didirikan pada tahun 2010. Sebagai divisi Huawei yang berdiri sendiri, HCSEC bertujuan untuk mengurangi risiko keamanan yang timbul dari keterlibatan Huawei dengan infrastruktur nasional yang vital di Inggris (Healy, 2023, p. 11).

Sebuah berita pers pada bulan Februari 2019 mengklaim bahwa National Cyber Security Center (NCSC)—sebuah badan keamanan Inggris yang berwenang atas keamanan siber Inggris—melalui laporan yang berjudul “*UK telecoms Supply Chain Review*” telah menyimpulkan bahwa Huawei dapat diintegrasikan dengan aman ke dalam infrastruktur 5G Inggris sebagai bagian dari proses peninjauan yang telah dilakukan oleh NCSC (SSDCMS, 2019). Kemudian, The Telegraph mengungkapkan pada bulan April 2019 bahwa National Security Center Inggris (NSC) telah memberikan persetujuannya bagi Huawei untuk menjadi bagian dari jaringan 5G negara tersebut (Healy, 2023, pp. 18-19).

Akan tetapi, keputusan tentang keterlibatan Huawei dalam pengembangan 5G Inggris belum dipublikasikan hingga *UK Telecoms Supply Chain Review* diterbitkan pada bulan Juli 2019. Menyusul penundaan lebih lanjut mengenai deklarasi keputusan tentang keterlibatan Huawei di 5G Inggris, pemerintah Inggris akhirnya menyatakan pada bulan Januari 2020 bahwa Huawei akan diizinkan secara terbatas dalam 5G Inggris (Healy, 2023, p. 20).

Pemberian izin terhadap Huawei tersebut menimbulkan respon kontra dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mempertanyakan komitmen Inggris terhadap “hubungan spesial” yang terjalin antara kedua negara tersebut, bahkan Washington juga mengancam akan memutuskan kerjasama intelijen yang sudah terlajin antara kedua negara tersebut (Choudhury, 2019). Amerika Serikat dan Inggris terikat dalam sebuah kerjasama intelijen yang dikenal dengan *UKUSA Agreement*. Kerjasama intelijen tersebut mendasari sebuah aliansi intelijen yang bernama Five Eyes, sebuah aliansi intelijen yang bertujuan untuk memudahkan akses intelijen melalui penghapusan batasan pembagian produk intelijen SIGINT (*signal intelligence*) antara anggota-anggotanya yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (J, 2017, p. 1). Five Eyes merupakan sebuah penamaan yang muncul dari klasifikasi keamanan yang tertera pada dokumen-dokumen intelijen dalam aliansi tersebut yaitu : “*SECRET—AUS/CAN/NZ/UK/US EYES ONLY.*”, sehingga menyebabkan munculnya penamaan atau denominasi “Five Eyes” untuk aliansi yang tercipta melalui Perjanjian ini (Williams, 2023, p. 101).

Five Eyes memiliki cakupan area operasi global dan ditunjang dengan pendanaan maupun fasilitas intelijen yang mumpuni (Pfluke, 2019, p. 306). Amerika Serikat menjadi figur pemimpin dalam Five Eyes secara unilateral, hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat memiliki aparatus pengumpulan intelijen yang masif dan ditopang dengan pendanaan yang masif ketimbang dengan sekutunya di Aliansi Five Eyes (Kerbaj, 2022, p. 252). Status dominan Amerika Serikat di Five Eyes kerap kali digunakan oleh Amerika Serikat untuk membuat sekutu aliansi Amerika Serikat di Five Eyes menuruti keinginannya (Kerbaj, 2023, p. 117).

Amerika Serikat dan negara-negara anggota Five Eyes lainnya (*i.e.* Kanada, Australia, dan Selandia Baru) memiliki kekhawatiran bahwa Huawei adalah sebuah ancaman keamanan (Christie et al., 2024). Kekhawatiran tersebut timbul dikarenakan adanya aturan “2017 *National Intelligence Law*” milik Tiongkok yang secara garis besar mewajibkan individu atau organisasi untuk bekerjasama dengan badan intelijen Tiongkok, terkait pembagian informasi apabila diminta oleh badan intelijen Tiongkok (Moore, 2023, p. 159). Hukum intelijen nasional Tiongkok tersebut mendasari kekhawatiran Amerika Serikat dan negara-negara anggota Five Eyes lainnya (*i.e.* Kanada, Australia, dan Selandia Baru) dapat menciptakan “akses pintu belakang” apabila perangkat 5G Huawei diintegrasikan ke dalam infrastruktur telekomunikasi Inggris, (Christie et al., 2024, p. 79) dan lebih lanjutnya dapat membahayakan jaringan intelijen Five Eyes (MP et al., 2019, p. 47).

Meskipun Inggris ditekan oleh Amerika Serikat, Inggris tetap melanjutkan pemberian izin kepada Huawei pada bulan Januari 2020, hingga pada bulan Juli, di tahun yang sama, Inggris melarang keterlibatan Huawei dalam pengembangan infrastruktur 5G dan mencabut seluruh perangkat telekomunikasi Huawei di Inggris (Friis & Lysne, 2021, p. 1188). Keputusan Inggris untuk mengizinkan Huawei dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur 5G di Inggris, mempertanyakan komitmen Inggris dalam menjaga keamanan dan kepercayaan Aliansi yang telah ditaruh oleh sekutu Inggris di Five Eyes.

Inggris dihadapkan pada sebuah dilema pada Kasus Huawei. Di satu sisi Inggris perlu mencapai kepentingan ekonomi nasionalnya melalui pengadaan teknologi 5G dengan menggunakan Huawei sebagai penyuplai perangkat telekomunikasinya dan di satu sisi Inggris perlu mencapai kepentingan keamanan nasionalnya melalui keterlibatannya sebagai anggota Aliansi Five Eyes. Eksistensi dari dilema yang dialami oleh Inggris seharusnya tidak terjadi, dikarneakna Inggris merupakan negara anggota Five Eyes yang seharusnya Inggris mematuhi ketentuan-ketentua yang berlaku di Aliansi Five Eyes, salah satunya terkait menjaga keamanan kerangka kerjasama intelijen yang terjalin. Dilema yang dihadapi oleh Inggris, memerlukan Inggris untuk mengorbankan salah satu

kepentingannya—ekonomi atau keamanan—agar tidak kehilangan untuk mencapai salah satu dari kepentingannya tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis melalui sudut pandang Inggris dalam mengatasi dilema Inggris dalam penggunaan Huawei sebagai penyuplai perangkat 5G untuk pembangunan infrastruktur 5G di Inggris. Penelitian ini akan berargumentasi bahwa keputusan Inggris terkait penggunaan perangkat 5G Huawei dipengaruhi oleh respon dari sekutu Inggris di Aliansi Five Eyes (*i.e.* Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru).

Pembahasan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Inggris terkait pemanfaatan Huawei ke dalam pengembangan infrastruktur 5G Inggris dengan membahas latar belakang kepentingan ekonomi Inggris yang tertuang pada *UK Digital Strategy 2017* dan membahas terkait kekhawatiran kemana Pemerintah Inggris terhadap Huawei yang tertuang pada tinjauan-tinjauan oleh komunitas intelijen Inggris. Bagian kedua akan membahas mengenai respon dan kekhawatiran yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru sebagai anggota Aliansi Five Eyes terhadap penggunaan perangkat Huawei dalam konteks pengembangan jaringan telekomunikasi. Bagian terakhir akan membahas mengenai implikasi dari respon dan kekhawatiran yang diekspresikan oleh sekutu Inggris di Five Eyes--terutama Amerika Serikat dan Australia--terhadap pengambilan kebijakan Inggris terkait pemanfaatan perangkat telekomunikasi 5G Huawei di Inggris menggunakan Teori Manajemen Aliansi.

Berdasarkan dari premis-premis yang telah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Maka penulis menetapkan judul penelitian ini **“Dilema Strategis Inggris Dalam Mengatasi Tekanan Five Eyes Pada Kontroversi 5G Huawei”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan yang telah disampaikan pada sub-bab latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah yang diangkat adalah **“Bagaimana posisi tawar Inggris dalam aliansi Five Eyes memengaruhi proses pengambilan keputusannya terkait keterlibatan Huawei dalam 5G?”**

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan membatasi pembahasan secara : (1) waktu, pembahasan akan mengangkat hal-hal yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2022, adapun penggunaan data yang melampaui tahun tersebut merupakan sebagai upaya penguatan aspek justifikasi dari argumen yang diangkat; (2) kontekstual, pembahasan akan membatasi pada subjek inti hubungan internasional yaitu keamanan internasional dan politik internasional, agar tidak terjadinya ekstensi berlebihan pembahasan dari kerangka analisis yang telah ditetapkan, adapun fenomena yang diteliti adalah Kontroversi Huawei di Inggris; (3) lokus penelitian yaitu Inggris sebagai lokus primer dan negara-negara Anglosfer lainnya (*i.e.* Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru) sebagai lokus sekunder penelitian.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dilema Inggris terkait izin pemanfaatan Huawei sebagai penyuplai perangkat 5G di Inggris.
2. Mengetahui kekhawatiran negara-negara Five Eyes terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi Huawei.
3. Menganalisis dilema Inggris atas tekanan Five Eyes pasca dikeluarkan izin pembangunan infrastruktur 5G Huawei.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai sumber rujukan bagi pembaca dalam menganalisis dilema penggunaan perangkat 5G Huawei.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan